

## C. Korupsi dalam Pandangan Islam

Cita-cita gerakan reformasi akan adanya suatu pemerintah yang bersih (*Clean Government*) dari korupsi untuk mewujudkan pemerintah yang efisien terbuka dan bertanggung jawab pada rakyat (*Good Governance*) di dorong oleh semakin menguatnya tuntutan demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan public. Korupsi hanya menguntungkan segelintir orang kaya. Karena korupsi terjadi ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam dan pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi diskriminasi hukum, serta kehancuran moral yang ternilai harganya.

Di dalam suatu rezim yang memiliki otoritas yang kuat pengawasan melalui institusi Negara, seperti yang sekarang tengah di tempuh, terbukti sudah tidak efektif lagi. Disinilah rakyat yang mengambil inisiatif untuk mengembangkan pengawasan missal , yang melibatkan peran serta masyarakat di semua lapisan social dan profesi.

Saat ini sudah terbangun bahwa korupsi hamper mustahil dapat di basmi, Kalau korupsi malah kebudayaan ,apa betul semua orang memiliki kesempatan untuk korupsi? Dari sudut pandang yang kita lihat saat ini, kita dapat berasumsi bahwa korupsi itu sesungguhnya soal kekuasaan dan kesempatan, atau budaya kekuasaan.

Hanya orang yang memiliki kekuasaan yang mempunyai kesempatan untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu korupsi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan menimbulkan kerugian umum.

Korupsi tumbuh selama masa order baru berkuasa, Kekuasaan yang dimiliki Soeharto begitu absolute, lepas dari kendali social. Cheks and balance dalam system politik menjadi macet. Sebab lembaga legislatif dan yudikatif disurbonisasi oleh kekuasaan, dan kekuatan control dari kalangan civil society karena mengalami tekanan yang kuat dari pemerintah pada saat itu.

Masyarakat harus menemukan patron-klien (pengayoman) yang pada gilirannya memberi kontribusi besar bagi langgengannya “Budaya Korupsi” di masyarakat. Masyarakat harus menemukan pengayom dan menyediakan uang pelican untuk mendapat fasilitas publik yang baik. Patronisasi politik dalam bisnis menjadi tidak terhindarkan dibawah sentralisasi kekuasaan ekonomi dan politik yang dibangun rezim Soeharto. Pemusatan kekuasaan ini dimungkinkan adanya dominasi

militer dalam kehidupan social politik dan lemahnya kaum borjuis nasional dan partai politik.

Struktur pemerintahan yang sentralistis member banyak peluang bagi kemungkinan terjadinya pungutan dan suap menyuap disetiap tingkatan birokrasi. Praktik korupsi dalam bentuk penyunatan anggaran atau pungutan-pungutan terhadap masyarakat oleh pegawai negeri sipil atau tentara selama ini dibiarkan berlangsung.

Dalam konteks korupsi demikian, maka gerakan transparansi untuk mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*, yakni adanya transparansi pertanggung jawaban kepada rakyat dan partisipasi, harus menjadi bagian demokratisasi system politik dan ekonomi, yang paling mendasar perlu adanya tekanan secara besar-besaran dari rakyat untuk reformasi hukum ketatanegaraan dan konstitusi untuk memperkecil monopoli dan kekuasaan politik. Informasi lebih <https://www.alfiandyboss.me>